

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan

¹Evi Pratama Sari, ²Sri Susmiyati, ³Sabran

¹Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: evipratamasari4@gmail.com

²Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: srisusmiyati2@gmail.com

³Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: sabran@uinsi.ac.id

Abstract *This study aims to analyze innovations in the evaluation methods of Islamic education policy in improving the quality of educational institutions. This topic is important because the evaluation of Islamic education policy has often remained administrative in nature and has not fully captured the academic, spiritual, moral, and character dimensions that constitute the core of Islamic education. This study employed a qualitative approach using a library research method. The data sources were obtained from several academic databases, including Google Scholar, Garuda, Sinta, and DOAJ, and were supported by relevant books and scientific journal articles. The literature was selected based on criteria of relevance to the topic, source credibility, publication recency, and contribution to the discussion of education policy evaluation and Islamic education. The analysis employed content analysis through the stages of identification, classification, in-depth reading, critical comparison, and synthesis of findings. The results show that evaluation models such as CIPP, Goal-Oriented Evaluation, and Utilization-Focused Evaluation have the potential to be adapted to the context of Islamic education; however, they require adjustment of indicators in order to become more holistic, participatory, and contextual. Innovation in evaluation methods is therefore essential so that policy evaluation does not stop at formal and administrative aspects, but truly functions as an instrument for the continuous improvement of the quality of Islamic educational institutions.*

Keywords : *policy evaluation, Islamic education, method innovation, institutional quality, evaluation models*

Pendahuluan

Eksistensi lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan fenomena sosiokultural dan pedagogis yang unik, yang telah melampaui perjalanan sejarah yang sangat panjang dari masa tradisional hingga era digital kontemporer. Sebagai pilar fundamental dalam sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan Islam, yang mencakup pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam, memikul tanggung jawab ganda yang berat mempertahankan transmisi nilai-nilai spriritualitas keagamaan (tafaqquh fid din) sekaligus memenuhi standar mutu akademik global yang terus berevolusi (Arief Efendi, 2025). Dinamika ini menuntut adanya mekanisme evaluasi kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif-formalitas, tetapi juga mampu menjadi instrumen transformatif dalam meningkatkan kualitas lembaga secara berkelanjutan. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealitas tujuan pendidikan islam dengan implementasi metode evaluasi yang diterapkan, terutama dalam menangkap dimensi karakter dan

spiritualitas yang menjadi run dari institusi tersebut (Aminuddin, 2025).

Pendidikan Islam adalah salah satu pilar utama dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, tuntutan terhadap kualitas pendidikan Islam menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu bersaing di era globalisasi. Kebijakan ini tidak hanya mencakup regulasi formal, tetapi juga strategi implementasi yang memfasilitasi kreativitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam menciptakan metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman (Nabila et al., 2025).

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak, dan bisa dilaksanakan. Didalam pengoprasia sebuah program maka evaluasi adalah hal yang wajib dibutuhkan. Evaluasi adalah sebuah prosedur atau kegiatan yang di kerjakan secara teratur dan merupakan tahap akhir didalam suatu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga menjadi proses yang memperlihatkan sebab-sebab keberhasilan serta kegagalan suatu kebijakan, agar mengetahui kebijakan berjalan dan mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Setiawan et al., 2022).

Evaluasi kebijakan pendidikan bukan hanya mencakup pada aspek teori, tetapi juga melibatkan pemantauan berkelanjutan yang merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan. Studi terbaru oleh sarry ddk (2024) menekankan bahwa efektivitas monitoring dan evaluasi (M&E) sangat di pengaruhi oleh metode pemantauan yang sistematis serta keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan M&E mampu mendeteksi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan ketimpangan implementasi antar sekolah, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk menguatkan sistem evaluasi ke depan. Selain itu, indikator keberhasilan evaluasi program pendidikan juga semakin berkembang, tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis siswa. Evaluasi harus dirancang secara menyeluruh dan adaptif, agar hasilnya dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kompleksitas dan kebutuhan rill di lapangan (Rohmah et al., 2026).

Kebijakan pendidikan Islam pada dasarnya bersifat holistik dan kontekstual, mengintegrasikan kerangka pendidikan umum dengan prinsip-prinsip Islam inti seperti keadilan ('adl), kesejahteraan (masalah), dan pembebasan (tahrir). Pendekatan ini menekankan pengembangan kapasitas intelektual dan moral, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan etika yang kuat. Manajemen dan kepemimpinan yang efektif dalam lembaga pendidikan sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, karena mereka memastikan bahwa nilai-nilai Islam tertanam dalam semua aspek Pendidikan Selain itu, proses evaluasi yang komprehensif sangat penting untuk menilai keselarasan metode pengajaran dengan nilai-nilai Islam, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan Dengan menganalisis secara kritis seluruh proses kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi, pemangku kepentingan dapat mengatasi tantangan kontemporer dengan lebih baik dan menumbuhkan generasi yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat (Sapriadi & Unir, 2025).

Permasalahan spesifik yang muncul dalam lima tahun terakhir berkaitan dengan ketergantungan pada metode evaluasi konvensional yang bersifat teknokratis. Metode ini cenderung mereduksi makna kualitas pendidikan menjadi sekadar angka-angka capaian kognitif, sementara dimensi afektif, spiritual, dan sosial yang merupakan nilai inti pendidikan Islam justru terabaikan (Hasibuan et al., 2026). Hasil studi literatur menunjukkan bahwa guru-guru madrasah sebenarnya menyadari pentingnya asesmen formatif dan holistik, namun dalam praktiknya, mereka masih terjebak pada penggunaan tes tertulis dan hafalan yang bersifat mekanistik (Fatmawati, 2025). Ketidakmampuan sistem evaluasi dalam memotret internalisasi nilai-nilai keagamaan menciptakan risiko lulusan yang mengalami split of personality atau kepribadian yang terpecah, di mana kecerdasan intelektual tidak berbanding lurus dengan kematangan moral.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah, lembaga pendidikan, maupun penyelenggara pendidikan Islam senantiasa merancang dan menjalankan berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini dirancang dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan, memperbaiki sistem pengajaran, menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan zaman, serta menjawab tantangan perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks. Namun, meskipun banyak kebijakan telah dirancang dengan baik, sering kali hasilnya tidak sesuai ekspektasi karena adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Salah satu faktor krusial yang turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan proses penting yang dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta dampak dari sebuah kebijakan. Tanpa evaluasi yang tepat, maka sulit untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan yang ingin dicapai benar-benar tercapai atau justru menyimpang dari rencana awal. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Mujib dkk., yang menyatakan bahwa pencapaian kompetensi peserta didik dapat diketahui melalui proses evaluasi. Artinya, evaluasi menjadi alat ukur untuk menilai seberapa besar tujuan pembelajaran berhasil dicapai oleh siswa setelah kebijakan tertentu diterapkan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa literatur modern menyarankan penggunaan model campuran (misalnya, CIPP, stake, Utilization-Focussed Evaluation, Logic Model) tergantung tujuan evaluasi, responsive dan utilization focused evaluation dinilai cocok untuk konteks yang memerlukan tindakan cepat oleh pemangku kepentingan. Implikasi: inovasi metode evaluasi pada pendidikan islam sebaiknya mengadopsi pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pemanfaatan hasil (Navlia & Jannah, 2025). Kemudian temuan penelitian Fiqi fahlevi, dkk, evaluasi kurikulum menunjukkan gap antara tujuan kurikulum dan praktik pembelajaran, beberapa penelitian menemukan kurikulum belum selalu mengakomodasi penguatan kompetensi abad 21 dan pembangunan karakter secara terpadu. Implikasinya, kebijakan kurikulum memerlukan alat evaluasi yang menyambungkan input kurikulum ke indikator pembelajaran karakter dan keterampilan (Fahlevi et al., 2023). Dameria Sinaga dan Budi Setiawan dalam temuannya evaluasi program digital yang menggunakan platform plus outcome pembelajaran menunjukkan hasil positif bila disertai pelatihan intensif bagi guru dan dukungan infrastruktur, tanpa itu, program tidak berkelanjutan. Implikasinya metode evaluasi harus mengukur kapabilitas implementasi (capacity for scale) selain outcome (Sinaga & Setiawan, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah menjelaskan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan serta menawarkan sejumlah model evaluasi seperti CIPP, goal-oriented evaluation, goal-free evaluation, countenance model, discrepancy model, dan CSE-UCLA. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada evaluasi program pendidikan secara umum, belum secara spesifik membangun kerangka evaluasi yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai basis analisis utama. Di sisi lain, praktik evaluasi di lembaga pendidikan Islam masih cenderung bersifat teknokratis, menekankan capaian kognitif, dan belum sepenuhnya mampu menangkap dimensi spiritual, afektif, moral, serta karakter yang menjadi inti pendidikan Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan konseptual dan kebutuhan praktis dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam.

Kesenjangan tersebut menjadi penting karena kebijakan pendidikan Islam tidak cukup dinilai hanya melalui indikator administratif atau hasil akademik semata, melainkan juga melalui sejauh mana kebijakan tersebut mampu membentuk karakter, menguatkan budaya religius, dan meningkatkan mutu lembaga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini berkontribusi dengan merumuskan dan menganalisis inovasi metode evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih holistik, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya menyintesis model-model evaluasi yang telah ada dengan kebutuhan khas pendidikan Islam, sehingga menghasilkan kerangka evaluasi yang tidak hanya menilai keberhasilan program, tetapi juga memberi arah perbaikan kebijakan secara berkelanjutan bagi madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya.

penelitian terdahulu masih memperlihatkan beberapa keterbatasan mendasar. Pertama, sebagian besar kajian evaluasi kebijakan pendidikan masih berfokus pada pengenalan dan perbandingan model evaluasi secara umum, tetapi belum merumuskan kerangka evaluasi yang benar-benar operasional untuk konteks pendidikan Islam. Kedua, indikator evaluasi yang digunakan dalam banyak studi masih didominasi oleh capaian administratif dan akademik, sehingga dimensi spiritual, moral, afektif, dan pembentukan karakter yang menjadi inti pendidikan Islam belum terukur secara memadai. Ketiga, pendekatan evaluasi yang ada umumnya masih bersifat top-down dan teknokratis, sehingga kurang memberi ruang bagi partisipasi guru, kepala madrasah, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses penilaian kebijakan.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menawarkan kontribusi baru melalui upaya menyusun pendekatan evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih holistik, partisipatif, dan kontekstual. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi antara model evaluasi yang telah ada dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan analisis, serta penekanan pada keseimbangan antara indikator akademik dan spiritual. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menjelaskan model evaluasi yang relevan, tetapi juga mengarahkan pada formulasi metode evaluasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lembaga pendidikan Islam di era kontemporer.

Kajian Pustaka

Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan strategis yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu melalui mekanisme yang terstruktur dan terencana. Dalam perspektif pendidikan Islam, kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan teologis, karena berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan Islam harus mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab (amanah) (Darmansah et al., 2026).

Secara konseptual, kebijakan pendidikan Islam mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan yang diarahkan pada pembentukan insan kamil. Dalam konteks nasional Indonesia, kebijakan pendidikan Islam terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional dan diatur melalui berbagai regulasi pemerintah yang mengatur madrasah serta satuan pendidikan berbasis keagamaan (Hidayati et al., 2025).

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai spiritual peserta didik. Hal ini menjadi pembeda utama antara kebijakan pendidikan umum dan kebijakan pendidikan Islam.

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kini evaluasi tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis bukti (*evidence based improvement*).

Menurut Daniel L. Stufflebeam dan Zhang, evaluasi adalah proses pengumpulan dan penyediaan informasi yang kredibel untuk membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan. Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang mereka kembangkan menekankan bahwa evaluasi harus komprehensif dan berorientasi pada perbaikan (*improvement oriented evaluation*) (Taali et al., 2024).

Sementara itu, Michael Quinn Patton melalui pendekatan *Utilization Focused evaluation* menegaskan bahwa evaluasi dinilai berhasil apabila hasilnya benar-benar digunakan oleh pemangku kepentingan. Artinya, desain evaluasi harus mempertimbangkan siapa pengguna utama hasil evaluasi dan bagaimana informasi tersebut akan dimanfaatkan (Gunawan & Harun, 2026).

Dalam perspektif kebijakan pendidikan global, laporan Organisation for economic Co-Operation and Development (OECD) menekankan pentingnya integrasi data kuantitatif, analisis kualitatif, serta partisipasi aktor pendidikan dalam proses evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan mutu sistem pendidikan.

Metode Evaluasi Pendidikan

Sebagai institusi yang mengelola pendidikan Islam di Indonesia, Kementerian Agama memegang peranan strategis dalam menyusun, melaksanakan, sekaligus

menilai berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Dalam praktiknya, lembaga ini kerap merujuk pada kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, terutama terkait standar nasional pendidikan dan pengembangan kurikulum (Muddin et al., 2025).

Meskipun demikian, pada ranah evaluasi kebijakan, Kementerian Agama memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual, selaras dengan landasan filosofis serta orientasi pendidikan Islam. Evaluasi dalam perspektif pendidikan Islam tidak semata-mata berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan, tetapi juga sebagai sarana reflektif yang berkesinambungan guna memperbaiki dan menyempurnakan program secara berkelanjutan (Muddin et al., 2025).

Model-model evaluasi seperti CIPP, *Goal-Oriented Evaluation*, dan *Utilization-Focused Evaluation* dapat diadaptasi untuk membaca kebijakan pendidikan Islam secara lebih kontekstual dan bermakna. Model CIPP tidak hanya digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dari sisi konteks, input, proses, dan produk, tetapi juga dapat diperluas dengan indikator yang mencerminkan visi pendidikan Islam, seperti internalisasi nilai keislaman, pembentukan akhlak, budaya religius, dan penguatan karakter peserta didik. Pada aspek konteks, evaluasi diarahkan untuk melihat apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan lembaga pendidikan Islam dan selaras dengan tujuan tarbiyah. Pada aspek input, evaluasi menilai kesiapan guru, kurikulum, kepemimpinan, sarana, dan budaya kelembagaan yang mendukung nilai-nilai Islam. Pada aspek proses, evaluasi menekankan bagaimana kebijakan dijalankan secara partisipatif, etis, dan sesuai dengan prinsip pendidikan Islam. Sementara pada aspek produk, evaluasi tidak cukup berhenti pada capaian akademik, tetapi juga harus menilai perubahan sikap, perilaku, spiritualitas, dan kualitas kehidupan religius di lembaga pendidikan.

Oleh karena itu, dibutuhkan model evaluasi yang dirancang sesuai dengan karakter, tujuan, dan substansi kebijakan pendidikan Islam. Model tersebut harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariat, tujuan hakiki pendidikan Islam (*maqashid al-ta'lim*), serta mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat di mana lembaga pendidikan itu beroperasi.

Konsep Kualitas Lembaga pendidikan

Kualitas Lembaga Pendidikan dalam teori manajemen modern dipahami sebagai kemampuan lembaga memenuhi standar akademik sekaligus harapan pemangku kepentingan. Menurut Sallis, kualitas dalam pendidikan mencakup kepemimpinan efektif, proses pembelajaran bermutu, sistem evaluasi berkelanjutan, serta kepuasan pelanggan pendidikan.

Dalam konteks Pendidikan Islam, kualitas memiliki dimensi tambahan berupa pembentukan karakter Islami dan internalisasi nilai-nilai spiritual. Hal ini menjadikan evaluasi kebijakan Pendidikan Islam lebih kompleks dibanding evaluasi pendidikan umum (Baedawih et al., 2025).

Fahlevi menemukan bahwa evaluasi kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah masih dominan berorientasi pada capaian kognitif dan belum secara sistematis mengukur dampak nilai dan karakter (Fahlevi et al., 2023). Temuan ini menunjukkan perlunya inovasi metode evaluasi yang mampu mengintegrasikan dimensi akademik dan spiritual secara terukur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode kajian kepustakaan (library research). Proses kajian dilakukan dengan menghimpun serta menelaah beragam referensi yang relevan, meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Inovasi Metode Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih guna menggali secara komprehensif pemahaman mengenai Inovasi Metode Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan (Creswell & Poth, 2023). Sumber data diperoleh dari berbagai database akademik, yaitu Google Scholar, Garuda, Sinta, dan DOAJ, serta didukung oleh buku-buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Seleksi referensi dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, keterbaruan publikasi, serta kontribusinya terhadap pembahasan evaluasi kebijakan pendidikan dan pendidikan Islam. Literatur yang dipilih terutama memuat pembahasan tentang konsep evaluasi kebijakan, model evaluasi pendidikan, dan penerapan evaluasi dalam konteks pendidikan Islam. Sementara itu, referensi yang tidak relevan dengan tema, bersifat duplikatif, atau tidak memiliki dasar akademik yang memadai dikeluarkan dari proses analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi literatur yang telah diseleksi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui beberapa tahapan, yaitu: pertama, identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan; kedua, pembacaan mendalam terhadap isi literatur; ketiga, pengelompokan data ke dalam tema-tema utama; keempat, perbandingan dan analisis kritis antar sumber; dan kelima, sintesis temuan untuk merumuskan kerangka konseptual mengenai inovasi metode evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Dengan tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan kajian yang sistematis, analitis, dan kontekstual terhadap pengembangan evaluasi kebijakan pendidikan Islam.

Pembahasan

Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam

Evaluasi dapat dipahami sebagai proses penghimpunan fakta secara terencana dan teratur guna mengetahui apakah benar telah terjadi perubahan pada diri peserta didik, sekaligus mengukur tingkat perkembangan yang dialaminya. Pada tahap awal

perkembangannya, konsep evaluasi dalam pendidikan sering diidentikkan dengan pencapaian hasil belajar. Salah satu rumusan awal dikemukakan oleh Ralph Tyler yang menjelaskan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah direalisasikan, pada aspek apa saja keberhasilannya tampak, serta bagian mana yang belum tercapai dan faktor penyebabnya (Jaysurrohman et al., 2021).

Menurut Stufflebeam, evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemaparan, dan penyediaan informasi yang relevan sebagai dasar dalam memilih serta menetapkan alternatif keputusan. Sementara itu, Anderson memaknai evaluasi sebagai proses untuk menilai capaian yang telah diperoleh dalam suatu perencanaan guna memastikan dukungannya terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Suharto mendefinisikan kebijakan sebagai suatu keputusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu, disusun secara sistematis untuk mengarahkan tindakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan (Jaysurrohman et al., 2021). Dalam pengertian yang lebih komprehensif, Cronbach dan Stufflebeam memandang evaluasi tidak hanya sebatas menilai ketercapaian tujuan, tetapi juga sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Secara etimologis, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian pengucapan tanpa menghilangkan makna dasarnya. Adapun istilah penilaian merupakan bentuk nomina yang bersumber dari kata nilai (Muhammad Taali et al., 2024).

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memegang peranan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menanamkan nilai-nilai spiritual pada peserta didik. Dalam konteks perubahan sosial dan arus globalisasi yang semakin dinamis, pendidikan Islam dituntut untuk lebih luwes serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang.

Melalui Kementerian Agama, pemerintah telah menyusun beragam regulasi dan program guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam, mencakup pembenahan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, hingga penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut kerap menghadapi hambatan, baik yang bersifat teknis maupun struktural, sehingga memengaruhi tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran pendidikan yang telah dirumuskan.

Oleh sebab itu, penilaian terhadap kebijakan pendidikan Islam menjadi sangat krusial untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menjawab permasalahan nyata di lapangan. Proses evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada hasil yang terukur secara angka, tetapi juga perlu menelaah dimensi kualitatif, seperti kesesuaian kurikulum, mutu proses pembelajaran, serta penguatan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam praktik pendidikan.

Kebijakan pendidikan Islam dapat dipahami sebagai serangkaian langkah strategis untuk memberdayakan peserta didik melalui penyusunan dan pelaksanaan aturan yang selaras dengan ajaran serta nilai-nilai keislaman. Secara umum, kebijakan pendidikan merupakan proses penyusunan gagasan, prinsip, dan ketentuan pokok yang menjadi landasan serta arah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan tersebut juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pengelola lembaga pendidikan dalam mengatur dan menjalankan program demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, kebijakan pendidikan berkaitan erat dengan upaya memaksimalkan potensi peserta didik. Karena pendidikan bersifat praktis dan berorientasi pada tindakan, maka kebijakan pendidikan pun menjadi bagian dari proses pembentukan manusia yang berlangsung dalam konteks lingkungan alam dan sosialnya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan wujud konkret dari visi dan misi pendidikan dalam suatu masyarakat. Kebijakan ini lahir dari kajian dan praktik pendidikan, sehingga mencakup tahapan analisis, perumusan, pelaksanaan, hingga penilaian atau evaluasi kebijakan secara menyeluruh.

Model-Model Evaluasi

Kementerian Agama memiliki posisi strategis dalam menyusun, menjalankan, serta menilai berbagai kebijakan di bidang pendidikan Islam. Peran tersebut muncul karena lembaga ini menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam praktiknya, arah kebijakan yang diambil sering kali mengikuti garis besar kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya berkaitan dengan standar nasional pendidikan dan pengembangan kurikulum.

Meski demikian, pada aspek evaluasi kebijakan, diperlukan pendekatan yang lebih berciri khas dan selaras dengan landasan filosofis serta orientasi tujuan pendidikan Islam. Evaluasi dalam perspektif pendidikan Islam tidak sebatas mengukur tingkat keberhasilan kebijakan, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang berkesinambungan guna menyempurnakan program di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerangka evaluasi yang sesuai dengan karakteristik, substansi, dan arah kebijakan pendidikan Islam itu sendiri. Model tersebut hendaknya mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, tujuan pendidikan Islam (*maqashid al-din*), serta mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya masyarakat di mana lembaga pendidikan beroperasi (Rizky Fadillah, 2025). Dalam model evaluasi kebijakan pendidikan, para pakar telah mengembangkan berbagai model evaluasi yang dapat dijadikan rujukan, di antaranya sebagai berikut:

Model evaluasi berorientasi tujuan mulai diperkenalkan pada tahun 1961 dengan fokus utama pada tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Keberhasilan diukur melalui capaian hasil belajar peserta didik, performa guru, efektivitas proses pembelajaran, serta kualitas layanan

pendidikan secara keseluruhan (Fionita et al., 2024). Model ini digagas oleh Ralph Tyler yang menempatkan tujuan sebagai pusat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan tetap sesuai sasaran (Warman et al., 2023). Keunggulan model ini terletak pada kejelasan fokus dan kemudahan operasional karena evaluator cukup membandingkan tujuan dengan hasil. Dalam pendidikan Islam model ini relevan untuk menilai capaian iman, ilmu, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Keterbatasannya muncul ketika tujuan dirumuskan sempit sehingga evaluasi juga menjadi terbatas. Aspek internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan perubahan perilaku religius sering sulit diukur secara kuantitatif. Dampak evaluasi mencakup simpangan negatif, dampak positif sesuai tujuan, serta simpangan positif yang muncul di luar target utama. Dalam praktik kebijakan seperti peningkatan kedisiplinan shalat berjamaah, model ini juga dapat menangkap efek tambahan seperti solidaritas siswa dan keterlibatan orang tua (Zain et al., 2025).

Model lepas tujuan atau goal free evaluation dikembangkan oleh Scriven dengan menekankan dua tahapan utama yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan saat program berlangsung untuk memberi umpan balik terhadap pelaksanaan, misalnya pemantauan implementasi kurikulum di madrasah. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai untuk menilai hasil akhir dan dampak keseluruhan kebijakan. Pendekatan ini memastikan evaluasi tidak hanya terjadi di akhir tetapi juga selama proses berlangsung. Kelebihan model ini terletak pada kemampuannya mengidentifikasi dampak nyata tanpa terikat tujuan formal sehingga efektif menemukan efek samping dalam program PAI. Kelemahannya terletak pada kurangnya arah operasional karena evaluator tidak berpatokan pada tujuan sehingga sulit digunakan dalam kebutuhan evaluasi yang membutuhkan standar jelas.

Model formatif dan sumatif yang juga dikembangkan oleh Scriven membedakan evaluasi ke dalam dua tahap utama. Evaluasi formatif berfungsi memperbaiki pelaksanaan program secara berkelanjutan saat program berjalan. Evaluasi sumatif berfungsi menilai hasil akhir serta tingkat keberhasilan program secara keseluruhan setelah program selesai. Dalam konteks pendidikan Islam model ini cukup kuat karena memungkinkan perbaikan berkelanjutan sekaligus penilaian akhir. Keterbatasannya muncul ketika indikator tidak dirumuskan secara spesifik sehingga hasil evaluasi cenderung normatif dan belum mampu menangkap perubahan nilai, kebiasaan religius, serta karakter peserta didik secara mendalam.

Model deskripsi pertimbangan atau countenance evaluation model yang dikembangkan oleh Stake menekankan perbandingan antara rencana dan pelaksanaan serta antara program yang sejenis. Evaluasi dilakukan dengan mengukur hasil berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Model ini mampu melihat keterkaitan antara apa yang direncanakan dan apa yang terjadi secara empiris. Dalam pendidikan Islam pendekatan ini relevan karena memperhatikan faktor budaya sekolah, keteladanan guru, dan interaksi keseharian. Kelemahannya terletak pada kebutuhan data yang

rinci dan observasi yang intensif sehingga menuntut kesiapan dokumentasi serta sumber daya manusia evaluator.

Model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam mencakup empat dimensi utama yaitu context, input, process, dan product. Evaluasi konteks berfokus pada identifikasi kebutuhan dan tujuan program. Evaluasi input menilai kesiapan sumber daya dan strategi pelaksanaan. Evaluasi proses meninjau pelaksanaan program sesuai rencana. Evaluasi produk menilai hasil akhir dan dampak program. Model ini dinilai paling komprehensif karena mencakup seluruh siklus program. Dalam pendidikan Islam pendekatan ini relevan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan visi tarbiyah, pembentukan akhlak, serta budaya religius. Keterbatasannya terletak pada kompleksitas yang tinggi sehingga memerlukan indikator yang jelas agar tidak menghasilkan penilaian yang terlalu umum (Ambiyar and Muhardika D, 2019).

Model kesenjangan atau discrepancy model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus menekankan pada identifikasi perbedaan antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan nyata. Evaluasi bertujuan mengukur sejauh mana program sesuai dengan kriteria serta mengidentifikasi celah pada setiap komponen. Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya menunjukkan jarak antara target kebijakan dan praktik di lapangan. Dalam pendidikan Islam model ini efektif untuk menilai kesesuaian implementasi PAI di madrasah. Kelemahannya adalah kecenderungan fokus pada kekurangan sehingga kurang memperhatikan aspek kultural, spiritual, dan proses pembentukan nilai.

Model CSE UCLA dikembangkan oleh Center for the Study of Evaluation di University of California Los Angeles. Model ini memiliki tahapan needs assessment, program planning, formative evaluation, dan summative evaluation. Needs assessment berfokus pada identifikasi kebutuhan dan tujuan program. Program planning mengevaluasi perencanaan program. Formative evaluation dilakukan saat pelaksanaan untuk mendeteksi kendala. Summative evaluation menilai hasil akhir dan dampak program (Ambiyar and Muhrdika D, 2019). Model ini memiliki kesamaan konseptual dengan CIPP dan berkembang dalam tradisi evaluasi akademik di Amerika. Kelebihannya adalah struktur evaluasi yang sistematis dan bertahap. Kelemahannya terletak pada potensi tumpang tindih dengan CIPP serta kebutuhan kemampuan analisis yang kuat.

Model utilization focused evaluation yang dikembangkan oleh Michael Quinn Patton menempatkan penggunaan hasil evaluasi sebagai inti utama. Evaluasi dianggap berhasil jika hasilnya benar benar digunakan oleh pengambil keputusan atau pemangku kepentingan. Fokusnya terletak pada primary intended users dan intended use sehingga sejak awal evaluasi dirancang sesuai kebutuhan pengguna (Patton, 2013). Evaluator berperan sebagai fasilitator yang memastikan hasil evaluasi relevan dan dapat dimanfaatkan. Model ini menekankan pentingnya konteks organisasi serta proses pembelajaran bagi pemangku kepentingan. Keunggulannya terletak pada orientasi praktis dan dampak nyata. Pendekatan ini sangat relevan

untuk kebijakan pendidikan Islam yang membutuhkan implementasi berkelanjutan dan adaptif.

Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam

Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan Islam memiliki fungsi strategis dalam menjaga kualitas sekaligus memastikan pelaksanaannya tetap relevan dengan ajaran Islam dan tuntutan masyarakat kontemporer. Meski demikian, praktik evaluasinya sering dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Hambatan tersebut bersifat kompleks dan mencakup faktor sumber daya manusia, tata kelola organisasi, ketersediaan fasilitas, hingga budaya kerja dalam lembaga pendidikan (Fauzi et al., 2023).

Dalam realitasnya, pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak selalu berlangsung sesuai perencanaan. Beragam persoalan kerap muncul, antara lain sebagai berikut: (1) Keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun jumlah tenaga profesional yang kompeten dalam bidang evaluasi kebijakan pendidikan, (2) Faktor politik yang dapat menghambat jalannya program, terutama ketika kepentingan kelompok tertentu mendorong upaya menutupi kelemahan program demi menjaga kesepakatan atau citra, (3) Kurangnya data dan informasi yang mutakhir serta berkualitas, karena pengumpulan data sering diperlakukan sekadar sebagai kewajiban administratif tanpa pendalaman substansi, (4) Kendala finansial, khususnya terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, termasuk pembiayaan tenaga administrasi dan evaluator, sehingga proses evaluasi sulit berjalan optimal tanpa dukungan dana yang memadai, (5) Hambatan psikologis, di mana sebagian pelaksana program memandang evaluasi sebagai bentuk penilaian personal terhadap kinerja mereka, yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran terhadap posisi atau karier, (6) Unsur subjektivitas dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga perbedaan perspektif memengaruhi cara menilai kebijakan maupun menentukan solusi atas permasalahan yang ada, (7) Kurangnya koordinasi dan sinergi antarpihak, yang menyulitkan proses penyelesaian masalah secara kolektif, (8) Dinamika sosial yang berkembang sangat cepat, menyebabkan kebijakan yang dievaluasi berpotensi menjadi kurang relevan dalam waktu singkat serta memunculkan tantangan baru yang lebih rumit, dan (9) Ketidakjelasan arah dan tujuan kebijakan akibat kompromi yang terjadi sejak tahap perumusan, sehingga landasan kebijakan menjadi kurang tegas dan berpengaruh pada proses evaluasinya (Zain et al., 2025).

Itulah beberapa Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam yang menjadi tantangan saat ini dan membutuhkan solusi yang diperlukan yakni melibatkan SDM, perbaikan manajemen data, dan menyesuaikan kurikulum terpadu. Problematika evaluasi kebijakan pendidikan Islam tidak hanya terletak pada lemahnya pelaksanaan evaluasi, tetapi juga pada keterbatasan pendekatan evaluasi yang digunakan. Selama ini, evaluasi sering dilakukan secara administratif, formal, dan berorientasi pada pelaporan, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap

efektivitas kebijakan secara substantif. Akibatnya, evaluasi lebih banyak menghasilkan informasi tentang keterlaksanaan program, tetapi belum cukup memberikan gambaran mengenai relevansi kebijakan dengan kebutuhan lembaga pendidikan Islam, kualitas proses implementasi, maupun dampaknya terhadap pembentukan akhlak, budaya religius, dan mutu kelembagaan secara berkelanjutan. Dalam kerangka kebijakan pendidikan modern, evaluasi seharusnya menjadi bagian dari siklus perbaikan mutu berbasis bukti, bukan sekadar pemenuhan administrasi. OECD menekankan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan perlu dilihat sebagai aktivitas yang berlangsung sepanjang siklus kebijakan, sebelum, selama, dan sesudah implementasi, agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih kuat dan tepat sasaran.

Dalam konteks pendidikan Islam, problematika tersebut menjadi lebih kompleks karena objek evaluasi tidak hanya menyangkut capaian akademik, tetapi juga dimensi nilai, moral, spiritual, dan karakter. Jika evaluasi hanya menggunakan ukuran kuantitatif formal, maka banyak tujuan substantif pendidikan Islam tidak akan terpotret secara memadai. Di sinilah inovasi metode evaluasi menjadi penting, yaitu sebagai upaya memperluas paradigma evaluasi dari yang semula sempit dan administratif menuju evaluasi yang lebih holistik, kontekstual, dan berorientasi perbaikan. Inovasi tersebut bukan hanya berarti penggunaan model baru, tetapi juga mencakup pengembangan indikator yang lebih relevan, perluasan sumber data, pelibatan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar transformasi kebijakan (Sufflebeam & Zhang, 2017). Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip *improvement-oriented evaluation* dalam model CIPP yang menempatkan evaluasi sebagai alat perbaikan program dan akuntabilitas secara bersamaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan metode evaluasi kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Model CIPP, *Goal-Oriented Evaluation*, dan *Utilization-Focused Evaluation* pada dasarnya memiliki relevansi teoretis dan praktis dalam evaluasi kebijakan pendidikan, namun penerapannya dalam konteks pendidikan Islam memerlukan adaptasi yang selaras dengan karakteristik, nilai dasar, dan tujuan substantif pendidikan Islam.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada sintesis kritis terhadap berbagai model evaluasi kebijakan ke dalam kerangka pengembangan metode evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih holistik. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan Islam tidak cukup dilakukan hanya melalui pengukuran aspek administratif dan akademik, tetapi perlu mencakup dimensi spiritual, moral, karakter, partisipasi pemangku kepentingan, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi

konseptual bagi penguatan metode evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih relevan, adaptif, dan berdaya guna dalam menjawab kebutuhan pengembangan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar, & D, M. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Alfabeta.
- Aminuddin, M. Y. (2025). *Dimensi Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah Dan Perguruan Tinggi Islam (Studi Fenomenologi Kebijakan Kementerian Agama Indonesia)*. 8(1), 24–41.
- Arief Efendi. (2025). *Peran Strategis Lembaga Pendidikan Berbasis Islam di Indonesia*. I(1), 1–11.
- Baedawih, A. M., Zakariah, A., Azhari, A., Sains, U., Al, I., & Warahmah, M. (2025). *Manajemen Pendidikan Efektif dalam Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan : Kajian Literatur*. 1(1), 222–231.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Darmansah, T., Maulana, F., Damanik, W., & Salsabilah, D. (2026). *Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah PAB Helvetia: Studi Analisis Kebijakan Publik*. 16(1), 12–21.
- Fahlevi, F., Nasution, M. R., Prabudi, M. I., & Maulana, I. (2023). *Evaluation of Islamic Religious Education Curriculum in Indonesia : Case Study at Elementary and Secondary School Levels*. 2(2), 140–147.
- Fatmawati, E. (2025). *Reconceptualizing Assesment In Islamic Eduction : A Critical Review Of Madrasah Evaluation Pratices In The 21St Century*. 5(2), 109–119. <https://doi.org/10.47945/jqaie.v5i2.2376>
- Fauzi, M. L., Nurrohman, H., & Casiyem, L. I. S. (2023). *Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam*. PT. Arr Rad Pratama.
- Fionita, W., Lauchia, R., Windari, S., & Wijaya, H. A. (2024). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan*. 7(6), 5732–5739.
- Gunawan, & Harun, M. S. (2026). *Evaluasi Penyuluhan: Program, Metodologi dan Studi Kasus*. PT.Ghani Press Group.
- Hasibuan, A., Lubis, Z., & Barus, Y. A. (2026). *Towards a Holistic Assessment Framework : Integrating Islamic Values into Madrasah Curriculum Evaluation*. 10(01), 290–303.
- Hidayati, O., Fitri, A., Negeri, I., Syarif, S., & Riau, K. (2025). *Kebijakan Pendidikan Islam*

- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., Setiawan, F., & Dahlan, U. A. (2021). *Problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan di indonesia.* 3(2), 215–227.
- Muddin, S., Rudi, & Suban, A. (2025). *Konsep Formulasi Strategi Dan Imlementasinya Pada Lembaga Pendidikan Islam.* 17(8).
- Muhammad Taali, Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nabila, P., Nur, S., Liza, A., & Aldi, M. (2025). *Kebijakan Pengembangan Inovasi Pendidikan Islam.* 02(02), 1260–1270.
- Navlia, R., & Jannah, I. W. (2025). *Model dan rancangan evaluasi program pendidikan.* 45–54. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2025.15.1.44-54>
- Patton, M. Q. (2012). *Essentials of Utilization-Focused Evaluation.* Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rizky Fadillah, E. S. (2025). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam: Konsep, Model, Kriteria, Dan Tantangan Implementasi Di Lembaga Pendidikan.* 1717–1734.
- Rohmah, A. Z., Ika, D., & Kebijakan, P. (2026). *Evaluasi kebijakan pendidikan.* 15, 1–10.
- Sapriadi, N. R., & Unir, U. U. (2025). *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam: Studi Atas Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Program Pendidikan Di Indonesia.* 14(4).
- Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan.* 1(8), 902–907. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>
- Sinaga, D., & Setiawan, B. (2025). *An Evaluation of Clinical Education Program by Digital Media Utilization at the Faculty of Medicine , Indonesian Christian University (FK UKI).* 19.
- Sufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model How to Evaluate for Improvement and Accountability.* New York London: The Guil Ford Press.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan : Kajian kebijakan kurikulum.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Warman, Komariyah, L., & Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum. (2023). *Konsep Umum Evaluasi Kebijakan.* 3, 25–32.
- Zain, A. H., Farihah, U., & Anwar, K. (2025). *Paradigma Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam : Konsep , Model dan Problematika.* 5, 58–76.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

